

## **Analisis Penyebab Lemahnya Fungsi Sosial Dan Fungsi Bisnis Bmt Di Kota Makassar**

**Rasyid Ridha<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>UIN Alauddin Makassar  
E-mail : ridhoachi@gmail.com

### **Abstrak,**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebab lemahnya fungsi sosial dan fungsi Bisnis BMT tersebut adalah faktor Sumber Daya Manusia paling dominan menjadi penyebab lemahnya fungsi sosial dan bisnis BMT di kota Makassar, setelah itu faktor manajemen, faktor metode dan prosedur kerja, faktor dana, dan faktor lingkungan. Langkah prioritas yang penting dilakukan oleh para pengelola BMT adalah pembenahan peningkatan kuantitas dan kualitas pengurus, staf maupun karyawan, melalui pelatihan-pelatihan.

Implikasi penelitian terhadap Analisis Penyebab Lemahnya Fungsi Sosial dan Fungsi Bisnis BMT di Kota Makassar akan memberikan informasi dan pemahaman bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya fungsi sosial dan bisnis BMT di Kota Makassar, dari temuan beberapa faktor yang menyebabkan pelemahan BMT tersebut, maka perlu evaluasi kembali tentang implementasi filosofi BMT sebagai lembaga yang mengemban fungsi sosial dan fungsi bisnis sekaligus.

**Keywords:** BMT, Fungsi Sosial, Fungsi Bisnis, Makassar.

### **PENDAHULUAN**

Misi mulia yang diemban BMT dengan dua fungsi maal dan fungsi *tamwil* tersebut merupakan refleksi dari bagian sistem perekonomian Islam yang menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan serta kesempatan berusaha bagi semua lapisan masyarakat. Selain berperan sebagai lembaga pembiayaan, BMT juga membawa misi sebagai lembaga sosial bagi masyarakat yang membutuhkan melalui akad-akad yang diaplikasikan dalam lembaga tersebut baik yang berbasis keadilan maupun kedermawanan.

Peran BMT juga strategis dalam rangka mengisi ruang yang tidak dimasuki oleh perbankan dalam menyediakan fasilitas pembiayaan kepada usaha-usaha mikro, mengatasi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, peranan BMT pada kenyataannya belum mampu melayani masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah atau kelompok fakir miskin secara optimal. Sementara, keberadaan jasa rentenir yang

menawarkan pinjaman cepat dengan bunga begitu tinggi kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak, hingga saat ini masih eksis di beberapa wilayah.

Menurut Sudarsono, BMT berperan untuk menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir dan menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam al-Qur'an, yaitu seruan untuk meninggalkan riba, mendirikan zakat dan menjaga keadilan ekonomi masyarakat. (Suharsono, 2004)

Semangat yang terkandung dalam peran BMT di atas adalah sebagaimana. dalam QS. al-Maidah/5:2, Allah swt. berfirman:

(Suharsono, 2004)Terjemahnya:

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Agama, 2013)

Optimalisasi peran BMT dalam menggerakkan dan meningkatkan kapasitas perekonomian masyarakat khususnya usaha kecil dan mikro perlu mendapat perhatian serta dukungan mengingat potensinya yang besar dalam mengangkat taraf kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, lembaga ini juga perlu meningkatkan perannya dalam pemberdayaan kelompok fakir miskin yang belum memiliki kapasitas untuk mendapatkan pembiayaan komersil karena tidak memadainya aset yang dimiliki.

Ada dua fungsi BMT yang berbeda, yaitu fungsi *baitul maal* sebagai institusi kolektor zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan distributor kepada mereka yang berhak atau disebut sebagai *mustahiq*, serta fungsi sebagai *baitul tamwil* yaitu institusi keuangan dan bisnis yang berorientasi pada pengembangan usaha-usaha produktif, seperti investasi yang diarahkan bagi kegiatan ekonomi skala kecil.

Upaya pemberdayaan *dhuafa* melalui fungsi social dan fungsi bisnis BMT tersebut diharapkan mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, sehingga mereka dapat mengatasi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan melaksanakan peran sosial, baik pada tingkat keluarga maupun masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat dari aspek

sosial tersebut, BMT hendaknya mampu mengantisipasi dengan memberdayakan fungsi *baitul maal-nya* dengan lebih baik. Keseimbangan yang terintegrasi dalam menjalankan fungsi *baitul maal* dan *baitul tamwil* tersebut akan lebih menjamin tersedianya pelayanan bagi masyarakat sekaligus mengoptimalkan manfaat dari kehadiran BMT tersebut.

Dengan definisi *Baitul Maal wat-Tamwil* tersebut berarti BMT dapat diartikan sebagai lembaga sosial-ekonomi, dimana dalam implementasinya harus selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara peran sosial dan peran ekonominya. BMT tidak boleh terjebak pada ekstrim kapitalisme yang hanya mengedepankan motif mencari keuntungan (*profit*). Tidak juga berpuas diri hanya sebagai lembaga yang memberikan manfaat sosial, tanpa memiliki kemampuan efisiensi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya dalam rangka mengembangkan lembaga secara ekonomi.

Di sinilah relevansi syariat Islam yang mengajarkan kepada umatnya untuk mengambil posisi pertengahan (moderat). Insan BMT perlu memiliki kesadaran untuk menempatkan posisi lembaga yang mampu menggabungkan antara pertimbangan laba dan manfaat sosial dalam sebuah mekanisme dan metode kerja yang membawa keberadaannya menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi umat.

BMT, seperti halnya LKM lain, masih menghadapi keterbatasan dalam hal permodalan. penguatan permodalan sangat efektif dilakukan melalui partisipasi anggota dalam penghimpunan dana, serta pentingnya upaya penguatan permodalan.

Penggalangan dana oleh BMT tidak saja terbatas pada dana "komersil" yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan, tetapi BMT juga memiliki peluang untuk menghimpun dana-dana *filantropi* (Kedermawanan sosial) dari para *aghnia* (orang kaya) yang dapat disalurkan kepada kelompok delapan *asnaf* serta masyarakat kurang mampu lainnya yang belum terlayani dengan akad-akad pembiayaan komersil. Pengelolaan dana *filantropi* berupa zakat, infaq, shadaqah, hibah, wakaf, dan lainnya itu selain untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan pokok, juga dapat disalurkan pada kegiatan produktif masyarakat dalam rangka meningkatkan

kapasitas usahanya, sehingga pada saatnya BMT dapat menindaklanjuti *supporting* permodalan dengan akad-akad pembiayaan (*tamwil*).

Menjembatani antara potensi serta kesadaran beramal para *aghnia*, dengan tuntutan pemberdayaan umat dan peluang pengembangan usaha mikro, menjadi tantangan tersendiri bagi BMT. Bukan saja karena BMT bergerak pada segmen masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga relevan dengan filosofi kelahiran lembaga BMT sebagai institusi yang hadir dengan dua pilar yang tidak terpisahkan, yaitu pilar bisnis dan pilar sosial.

Fungsi sosial BMT sebagai *baitul maal* dapat diimplementasikan begitu luas, tidak saja terbatas pada penggalangan dana dan penyaluran yang bersifat *charity*, tetapi juga penyaluran dana untuk kegiatan produktif masyarakat kelompok fakir miskin dalam rangka pemberdayaan, yang diharapkan akan dapat berkembang menjadi usaha yang mandiri. Konsep lembaga BMT ini meski terinspirasi dari *baitul maal* yang dipraktikkan pada masa Rasulullah saw dan mulai dilembagakan pada masa sahabat, tetapi berbeda baik menyangkut cakupan operasinya maupun manajemennya.

Misi sosial BMT tersebut juga dapat diterapkan pada sektor usaha mikro informal, terutama dalam menanggulangi keterbatasan para pelaku usaha mikro khususnya dalam aspek permodalan, yang biasanya terkait dengan ketidakmampuan menyediakan jaminan dalam proses pembiayaan untuk memulai atau melanjutkan usahanya. Dalam menjalankan fungsi sosial tersebut, BMT dapat menggunakan akad pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*), hibah, atau dana bergulir. Dengan demikian, baik fungsi bisnis maupun fungsi sosial BMT dapat terintegrasi dalam rangka mengatasi kendala kelangsungan dan perkembangan sektor usaha mikro dan juga kebutuhan dasar masyarakat miskin.

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah paling sederhana yang saat ini banyak muncul dan tenggelam di Indonesia. Keberadaan BMT dengan jumlah yang signifikan pada beberapa daerah di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan BMT untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan banyak BMT yang tenggelam dan

bubar. Beberapa data menunjukkan di daerah-daerah tertentu keberadaan BMT cukup memperhatikan. Seperti di Kabupaten Ciamis jumlah BMT mencapai 42 buah. Namun, sekarang yang tersisa hanya 7 buah. Di daerah Tasikmalaya yang pernah mencapai 50 buah lebih, kini BMT tersisa 12 buah. Jumlah sebanyak 12 BMT yang masih ada yaitu di Kabupaten Tasikmalaya 5 buah dan Kota Tasikmalaya 7 buah. Begitu juga di Kabupaten Garut dan Sumedang, kondisinya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Tasikmalaya atau Ciamis. di kota Bandung, keberadaan BMT sebagai badan penunjang dana bagi masyarakat ekonomi lemah terancam bangkrut. Dari 32 BMT MUI, kini jumlahnya makin menciut tinggal 8 BMT saja yang masih beroperasi. Bahkan, BMT yang memiliki aset sekitar Rp 1,3 miliar itu juga menghadapi masalah kredit macet (Gampito, 2008). Hal serupa juga terjadi di Kota Makassar, berdasarkan data dari PINBUK Sul-Sel bahwa jumlah BMT yang tercatat di Kota Makassar sekitar 33 BMT dan yang aktif hanya sekitar 15 BMT (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)

Dengan melihat fenomena di atas perkembangan BMT dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab masalah riil ekonomi yang ada di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) yang masih lemah, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan BMT dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional. Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat tentang keberadaan BMT di antara lembaga keuangan konvensional.

Padahal bila dilihat dari latar belakang berdirinya, BMT merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat Muslim. Kehadiran BMT muncul di saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bebas dari unsur riba yang dinyatakan haram. Eksistensi lembaga keuangan syariah sejenis BMT, jelas memiliki arti

penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan BMT sangat berarti bagi masyarakat karena BMT merupakan suatu lembaga mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan. BMT tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial.

Dilihat secara konsepsi, BMT merupakan suatu lembaga yang eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat terutama kalangan mikro. Akan tetapi di sisi lain yaitu dalam bidang operasionalnya masih memiliki banyak kelemahan. Maka problematika tersebut harus dapat diatasi dengan baik agar mampu mewujudkan terciptanya citra positif bagi BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bersih dan dipercaya oleh masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Nasution, 1996). Penelitian ini akan mendeskripsikan objek secara alamiah tentang Penyebab Lemahnya Fungsi Sosial dan Fungsi Bisnis BMT di Kota Makassar.

### **1. Lokasi Penelitian**

Proses aplikasi kajian ini diawali dengan menentukan serta menetapkan lokasi penelitian. Menurut S. Nasution bahwa tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penelitian antara lain adalah: menetapkan lokasi, tempat, dan aktifitas kegiatan. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan.

Dari data PINBUK Sul-Sel terdapat 80 BMT yang terdaftar di kabupaten dan kota. Namun yang tercatat sampai hari ini dan aktif hanya 33 BMT di Sulawesi Selatan, adapun jumlah BMT yang aktif di kota Makassar ada 15 BMT, dari jumlah BMT yang berada di kota Makassar tidak semua BMT tersebut memiliki performa manajemen dan keuangan yang cukup baik pada saat penelitian ini dilaksanakan. Sebagian diantaranya perkembangannya cenderung jalan ditempat, yang mengikuti program pendampingan PINBUK tersebut masih eksis dan berjalan hingga sekarang, diantaranya menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Berdasarkan data dari PINBUK Sulawesi Selatan, 10 dari 15 BMT dipilih dengan pertimbangan kinerjanya yang relatif lebih baik dibanding yang lain dilihat dari aspek *tamwil-nya*, serta dinilai dapat "mewakili" potret pengelolaan BMT lainnya yang ada di Kota Makassar baik dalam aspek pengelolaan kelembagaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Para pihak yang terlibat dalam mengurai permasalahan adalah pengurus dan pengelola BMT yang menjadi objek penelitian. Dalam rangka mengidentifikasi penyebab masalah.

### a. Analisis Lemahnya Fungsi Bisnis

Katagorisasi yang digunakan adalah: (1) *Manpower* atau tenaga kerja; berkaitan dengan kurangnya pemahaman (tidak terlatih, tidak berpengalaman), kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan motivasi kerja, dan lain-lain. (2) *Management* atau aspek pengelolaan; berkaitan dengan instrumen organisasi, struktur, pengambilan keputusan, training, dan pendampingan dalam operasional BMT. (3) *Methods* atau metode kerja; berkaitan dengan prosedur dan metode kerja yang mendukung fungsi-fungsi BMT, standardisasi operasional fungsi BMT, dan lain-lain. (4) *Money* atau uang; berkaitan dengan dukungan finansial dalam menunjang fungsi-fungsi BMT. (5) *Environment* atau lingkungan; yang berkaitan dengan aspek lingkungan masyarakat

#### 1. *Manpower*

Di dalam proses awal penelitian, dari hasil wawancara dengan Direktur PINBUK beliau mengemukakan bahwa banyaknya BMT yang hampir gulung tikar, padahal di masa awal

berdirinya BMT tersebut mampu memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya. Para pengelola BMT tersebut diketahui bahwa pada masa awal pendiriannya BMT-BMT tersebut ditopang oleh modal yang dipinjamkan oleh sebuah lembaga keuangan perbankan syariah. Namun seiring dengan perjalanan waktu, diketahui bahwa ternyata pengelola BMT kurang piawai dalam mengatur keuangan BMT tersebut, serta terdapat kekeliruan dalam melakukan analisis pembiayaan.

Lebih jauh dikemukakan oleh Arman, SE bahwa dari situlah diketahui tentang pentingnya peranan kualitas sumber daya insani BMT. Apalagi mengingat bahwa pada BMT tidak ada aturan baku, sebagaimana lazimnya lembaga keuangan perbankan, sehingga pengelola harus mengatur sendiri strategi operasionalnya. Untuk dapat mengatur strategi yang tepat maka penting untuk memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan BMT.

Dari studi lapangan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa para praktisi BMT berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda, mereka tidak juga lulusan perguruan tinggi agama atau lebih khusus lagi jurusan ekonomi Islam. Para karyawan mereka banyak berasal dari pendidikan sekolah umum.

Dari wawancara dengan manager BMT Kube Unit 035 tentang faktor yang mempengaruhi lemahnya fungsi SDM diperoleh informasi bahwa mayoritas praktisi BMT masih kurang mendapatkan training, pelatihan, atau pembekalan bagi pengurus maupun pengelola BMT dalam menjalankan fungsi bisnisnya, Hal tersebut menyebabkan kemampuan mereka dalam melakukan pengelolaan BMT kurang maksimal. Pengetahuan yang relatif minim berkaitan dengan pengelolaan BMT, menyebabkan perkembangan BMT seolah jalan di tempat. Pelatihan berkaitan dengan manajemen BMT yang secara rutin diharapkan mampu memberikan wawasan dan kemampuan manajerial dalam pengelolaan BMT.

Senada dengan itu manager BMT Ukhuwa UMI, mengatakan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap lemahnya fungsi *tamwil* BMT di kota Makassar pada umumnya adalah faktor sumber daya insani yang kurang mumpuni mengelola lembaga BMT, karena kurang dibekali dengan training, pelatihan, dan pembekalan bagi pengurus maupun pengelola BMT.



Menurut Syahrir manager BMT Kube Unit 034, mengatakan bahwa keberadaan lembaga pendamping yang memberikan asistensi terhadap BMT tentang penanganan pembiayaan bermasalah, atau operasional lembaga yang efektif dan efisien yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga tidak maksimal. Akhirnya berdampak kepada lemahnya pemahaman baik sisi pengembangan bisnis maupun sisi syariah. Pengurus BMT masih banyak yang belum memahami tentang prinsip-prinsip syariah dan prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Dengan kata lain belum terpenuhinya sumber daya insani yang mumpuni di bidang ekonomi syariah, dalam hal ini lembaga BMT.

Adapun Manager BMT Khasnah Insan Syariah mengemukakan bahwa peran pemerintah dalam hal melakukan pembinaan kepada BMT di Kota Makassar masih sangat minim. Keberadaan BMT yang relatif masih mudah tentunya membutuhkan pembinaan dan pendampingan secara intensif agar BMT di Kota Makassar cepat berkembang dan mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat level bawah. Keterbatasan dana yang dimiliki BMT menyebabkan kemampuan untuk melatih karyawan sangat terbatas, sehingga kesempatan bagi praktisi BMT dalam mengembangkan kemampuannya sangat kurang, sehingga diperlukan pihak lain seperti pemerintah dan sektor perbankan.

Dari hasil penelitian, pola rekrutmen yang dilakukan sebagian besar masih sangat sederhana. Standarisasi mengenai kualitas calon SDM belum ada, sehingga banyak karyawan BMT yang tidak paham tentang pengelolaan BMT itu sendiri. Selama ini rekrutmen yang dilakukan oleh BMT masih bersifat tradisional, BMT belum berorientasi pada profesionalisme dan kinerja. Hal ini menyebabkan banyak BMT yang kurang tenaga yang berkualitas dan memiliki kompetensi secara professional.

Secara umum sumber daya insani yang dimiliki BMT di Makassar relatif belum professional.

## 2. *Management*

Kestabilan kondisi sebuah BMT dapat dilihat dari kesuksesan mengelola serta mengatur operasionalnya. Saat ini euforia fenomena pendirian dan pengembangan BMT yang sangat mudah menyebabkan tidak sedikit pula terdapat BMT tidak beroperasi secara maksimal atau stagnan bahkan kolaps.

Terkait dengan manajemen SDM (pembagian peran dan fungsi) dari temuan realita di lapangan, mayoritas BMT masih belum profesional, Jika dibandingkan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab di perbankan konvensional, maka tampaknya BMT sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah banyak yang masih kurang teratur.

Manager BMT Fastabiqul Khaerat, Abdu Sjukur STP mengakui bahwa karyawan di kantor pun memikul tanggung jawab bekerja di lapangan dengan tugas seperti menagih setoran bagi hasil dan mengawasi calon nasabah dalam proses studi kelayakan, sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab belum profesional, beliau juga menuturkan bahwa para karyawan belum mendapatkan pelatihan khusus berkaitan dengan pengelolaan BMT, hal tersebut menyebabkan kemampuan mereka dalam melakukan pengelolaan BMT kurang maksimal.

Pada tahap awal perkembangan, fakta tersebut dapat dimaklumi. Tetapi jelas hal tersebut merupakan indikasi bagi budaya kerja yang kurang profesional. jika fungsi pengawasan dilakukan oleh praktisi yang berbeda-beda maka upaya semacam ini jelas membutuhkan kerja koordinasi yang tinggi di antara mereka. Sementara masing-masing telah mengemban tanggung jawab sendiri-sendiri. Hal ini berakibat tidak maksimalnya fungsi pengawasan yang diberikan.

Namun demikian, sudah ada beberapa BMT yang mulai memberikan pembagian tugas lebih jelas dan rapi. Bahkan BMT yang semacam ini telah membuka cabang, seperti BMT Kube 036, yang beralamat di jalan Maccini Sawah, membuka cabang BMT Kube 036 (Ablam) di jalan Abu Bakar Lambogo.

Menurut keterangan dari manager BMT Al-Kautsar mengatakan bahwa fungsi dari Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Manajemen, sebagai pengawas terhadap proses dan prosedur *Baitut tamwil* masih belum optimal. Karena pengawasan yang efektif

merupakan alat kontrol bagi BMT untuk beroperasi secara sehat sehingga dapat berkembang secara wajar dan sehat serta memperoleh kepercayaan masyarakat.

### 3. *Method*

Pada katagorisasi metode kerja, dari hasil observasi ditemukan bahwa Peneliti mengalami kesulitan untuk melihat atau memperoleh salinan SOP, dengan alasan keduanya sedang dalam tahap formulasi revisi penyempurnaan.

Pola pengelolaan yang dilakukan BMT dari hasil observasi dan wawancara 80% masih bersifat tradisional. Mereka belum menerapkan standarisasi prosedur pengelolaan BMT yang terinci, jelas, pasti dan terformalkan.

Dan juga sebagian besar BMT yang ada kurang mampu mengembangkan produk-produk baru yang inovatif yang mampu meningkatkan daya saing dengan lembaga keuangan berskala besar dan dengan lembaga keuangan mikro lainnya. Hal ini dikarenakan umumnya BMT memiliki kualitas SDM yang rendah, dana yang terbatas untuk membiayai kegiatan riset dan pengembangan pasar, serta tidak memiliki strategi untuk mengatasi hambatan tersebut.

BMT yang ada masih kurang memiliki perangkat teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasionalnya ataupun jika ada tidak mampu memanfaatkannya secara optimal karena keterbatasan SDM.

### 4. *Money*

Dalam katagori dana (*money*), dari hasil wawancara dengan manager BMT Kube 034 akar masalahnya adalah BMT umumnya memiliki modal yang relatif kecil dan sulit untuk menambah modal apabila diperlukan. pada umumnya BMT yang ada di lapangan memiliki aset berkisar Rp. 10–50 juta, Ada beberapa BMT yang memiliki aset di atas Rp 100 juta tetapi jumlahnya hanya sedikit. Modal pendanaan merupakan fondasi dalam operasional suatu lembaga keuangan. Hal ini berarti ketersediaan dana yang terbatas pada sebagian besar BMT di makassar akan mempersulit pengembangan usahanya.

Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini yang menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup

cepat dan belum tentu pembiayaan yang diberikan BMT cukup memadai untuk modal usaha masyarakat. Dalam melayani penyaluran dana kepada masyarakat dinilai belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir walaupun keberadaan BMT cukup dikenal. Hal ini disebabkan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat.

#### 5. *Environment*

Menurut keterangan wawancara lanjutan dengan manager BMT Alkautsar beliau mengatakan bahwa sulitnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat luas (*public trust*) terhadap jasa dan pelayanan yang bisa diberikan BMT, salah satu sebabnya karena persaingan yang dihadapi berasal dari lembaga keuangan mikro lainnya maupun dengan bank umum yang memiliki unit usaha kecil atau cabang di daerah itu, dan juga dengan BMT itu sendiri, BMT cenderung menganggap BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan yang mengakibatkan kebersamaan dalam menjalin koordinasi demi kelancaran operasionalisasi menjadi terhambat. Ini merupakan salah satu faktor yang menghambat kemajuan BMT di Indonesia pada umumnya, dan khususnya di Makassar.

Kemudian lebih lanjut beliau mengatakan bahwa tidak adanya jaringan yang kuat merupakan suatu kelemahan besar yang dihadapi BMT. Lemahnya jaringan berarti bahwa jaringan ada namun tidak memberikan arti dan perubahan yang lebih baik kepada anggota-anggota jaringan tersebut. Sistem jaringan yang lemah juga menyulitkan dalam menghadapi suatu permasalahan. Hal ini disebabkan beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah disatu BMT tetapi di BMT lain juga bermasalah. Apabila terdapat jaringan koordinasi yang baik antar BMT maka nasabah tersebut tidak akan dapat mengakses dana dari BMT lainnya karena dia sudah bermasalah di salah satu BMT, akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jaringan koordinasi antar BMT masih lemah dan sampai saat ini belum ada suatu lembaga khusus yang menjadi induk BMT di seluruh Indonesia. Sehingga BMT cenderung berdiri sendiri serta mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

BMT yang berkembang tidak didukung dengan ketentuan hukum dan sistem pengawasan atau pembinaan yang memadai. Saat ini BMT menggunakan RUU Badan Hukum Koperasi dinilai kurang sesuai dengan kondisi BMT yang merupakan jenis lembaga intermediasi berskala mikro. Namun BMT juga bukan perbankan sehingga otoritas pengawasan tidak berada di Bank Indonesia. Hal ini menyebabkan kedudukan BMT sebagai lembaga keuangan secara hukum belum jelas sehingga ada sebagian masyarakat yang mengasumsikannya sebagai bank gelap.

Dan juga belum adanya standar pembinaan dan pengawasan yang baku untuk BMT dan ada beberapa BMT yang belum mempunyai lembaga pengawas, secara tidak langsung telah ikut menghambat perkembangan BMT. Pengawasan yang efektif merupakan alat kontrol bagi BMT untuk beroperasi secara sehat sehingga dapat berkembang secara wajar dan sehat serta memperoleh kepercayaan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

### Kesimpulan

Berdasarkan rumusan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka sebagai implikasi penelitian terhadap Analisis Penyebab Lemahnya Fungsi Sosial dan Fungsi Bisnis BMT di Kota Makassar akan memberikan informasi dan pemahaman bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya fungsi sosial dan fungsi bisnis BMT di kota Makassar diantaranya: Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), Manajemen, Metode, Modal, dan Lingkungan, diantara akar penyebab masalah yang paling berpengaruh terhadap pelemahan BMT yang ada di Kota Makassar adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM).

Dari temuan beberapa faktor yang menyebabkan pelemahan BMT tersebut, maka perlu evaluasi kembali tentang implementasi filosofi BMT sebagai lembaga yang mengemban fungsi sosial dan fungsi bisnis sekaligus. Baik dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen, metode kerja, serta dukungan finansial baik secara internal maupun eksternal.

Berjalannya dua fungsi dalam lembaga keuangan mikro syariah *Baitul Maal wat Tamwil*, yaitu fungsi bisnis (*baitul tamwil*) dan fungsi sosial (*baitul maal*), merupakan suatu hal yang diharapkan dan asasi sesuai dengan prinsip *muamalah* dalam Islam. Semoga melalui hasil penelitian ini, penulis mengharapkan ada penelitian lanjutan yang dikaji oleh peneliti-peneliti lain untuk melihat secara lebih detail dan lebih terperinci mengenai Faktor Penyebab Lemahnya Fungsi Sosial dan Fungsi Bisnis BMT, dan menawarkan solusi konkrit, sehingga eksistensi BMT dapat tetap eksis ditengah masyarakat dan lebih produktif lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agama, K. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Gampito. (2008, juni). <http://gampito.blogspot.co.id/>. Retrieved from <http://gampito.blogspot.co.id/: http://gampito.blogspot.co.id/2008/06/probematika-operasionaliasi-bmt.html>
- Nasution. (1996). *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil.
- Suharsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.